**Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (AEPPG)**
**Volume 2, Nomor 3, Agustus 2025**
e-ISSN: 3046-9856; p-ISSN: 3046-9872, Hal. 123-130
DOI: https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1442
*Available online at*: https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG

# Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao

**Agnes Fontanella Un Bau[1*], Dr. Henny A. Manafe[2], Antonius Y.W.Timuneno[3]**
[1-3] Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Kupang, NTT, Indonesia
*Korespondensi penulis: agnesfontanella5@gmail.com*[*]

***Abstract.*** *The implementation of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD) represents a strategic initiative to strengthen transparency, accountability, and efficiency in regional financial management. Designed to integrate financial data and facilitate standardized reporting across local government units, SIPD is regulated under Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019. However, in practice, the adoption of SIPD in various regions, including Rote Ndao Regency, encounters persistent technical and administrative challenges that limit its optimal utilization. This study aims to evaluate the effectiveness of SIPD in managing regional finances within Rote Ndao Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, direct observation of system operations, and analysis of relevant documents. The findings reveal that SIPD implementation in Rote Ndao generally complies with the regulatory framework, indicating that the system has been formally adopted and is operational within the expected governance structure. Nonetheless, several issues undermine its effectiveness, including frequent system errors, limited functionality in accounting and reporting modules, and delays in data entry from organizational units. These limitations affect the timeliness, accuracy, and integration of financial reports, ultimately constraining decision-making processes. The study suggests that to fully realize SIPD's potential, strategic improvements are required. These include enhancing the capacity and skills of human resources responsible for system operation, upgrading IT infrastructure to ensure system stability, and expanding SIPD's features to meet practical accounting and reporting needs. The research contributes valuable insights for regional governments, policymakers, and system developers, emphasizing the need for continuous system refinement, targeted training programs, and infrastructure investment. By addressing these challenges, SIPD can serve as a more reliable and sustainable tool for promoting transparent and accountable regional financial governance.*

***Keywords****: Regional Financial Management, Regional Government Information System (SIPD), Rote Ndao Regency*

**Abstrak.** Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Rote Ndao, masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Rote Ndao telah mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala seperti gangguan teknis sistem, keterbatasan fitur pelaporan, serta keterlambatan input data oleh OPD. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan fitur SIPD yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pengembang sistem dalam mengoptimalkan implementasi SIPD sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci**: Kabupaten Rote Ndao, Pengelolaan Keuangan Daerah, *SIPD*

*Received: 17 Juli, 2025; Revised: 31 Juli, 2025; Accepted: 09 Agustus, 2025; Published: 11 Agustus, 2025*

## 1. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pemerintahan dari terpusat menjadi otonomi telah mendorong perlunya sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Permendagri No. 70 Tahun 2019 diterbitkan sebagai pengganti Permendagri No. 8 Tahun 2014, menandai transformasi besar dalam pengelolaan informasi pemerintahan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD menjadi sistem terintegrasi yang mengelola seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efisiensi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Kabupaten Rote Ndao, SIPD mulai diterapkan sejak tahun 2019 sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi pusat. Penerapan sistem ini telah mendukung penyusunan dokumen anggaran seperti RKA, RKPD, dan RAPBD secara digital. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan fitur pelaporan, gangguan teknis sistem, hingga keterlambatan input data dari OPD. Kondisi ini berdampak pada proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis, sehingga beberapa laporan keuangan masih disusun secara manual.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai daerah juga menghadapi tantangan serupa dalam penerapan SIPD, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Penelitian oleh Alifia (2021), Nasution (2021), dan Muhammad (2022) menyoroti masalah sistem error, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan pemahaman pelaksana terhadap sistem. Namun, penelitian ini berbeda karena mengevaluasi SIPD secara komprehensif dari seluruh tahapan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rote Ndao, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Sistem Informasi

Sistem informasi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan organisasi (Charter, 2016). Informasi yang berkualitas harus memenuhi prinsip tepat orang, tepat waktu, dan tepat nilai (Nasution, 2021). Karakteristiknya meliputi informasi baru, tambahan, kolektif, dan penegas (Anggraeni & Irvani, 2017). Komponen utama sistem informasi mencakup input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol (Laudon & Laudon, 2018).

**Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**

SIPD merupakan sistem terintegrasi berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyatukan informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya (Permendagri No. 70 Tahun 2019). Fungsinya antara lain sebagai pusat referensi nasional, sistem perencanaan dan keuangan, serta alat evaluasi dan pengambilan keputusan (Edu, 2024). SIPD bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan pemerintahan daerah (Pesak, 2021; Inzany, 2022). Aspek kualitas SIPD ditentukan oleh akurasi data, integrasi, aksesibilitas, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian regulasi.

**Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang harus dilakukan secara efisien dan akuntabel (Vitriana, 2022). SIPD mendukung proses ini dengan menyediakan sistem digital yang terintegrasi, transparan, dan real-time sesuai dengan amanat PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. Penelitian dilakukan dalam situasi sebenarnya di lapangan, dengan informan penelitian yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penggunaan SIPD, terdiri atas Kepala Bidang Akuntansi, Bendahara, dan Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi dan laporan keuangan. Instrumen diuji validitasnya melalui triangulasi sumber dan teknik, dan hasilnya menunjukkan konsistensi informasi antar-informan dan dokumen pendukung. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Rote Ndao Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Data yang dihimpun memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan SIPD dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao.

BKAD Kabupaten Rote Ndao telah menggunakan SIPD sejak tahun 2019 dan mulai berjalan secara efektif sejak tahun 2022. Sebelumnya BKAD menggunakan SIMDA dan pencatatan manual. Implementasi SIPD telah mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan, yang terintegrasi dalam informasi keuangan daerah pada SIPD meskipun masih terdapat kendala teknis dan fungsional pada beberapa modul.

### Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao

**a. Perencanaan**

Perencanaan dimulai dengan penyusunan RKPD oleh Bapelitbang Tahap ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah seperti penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Penyusunan dimulai dengan persiapan yang meliputi analisis kondisi daerah, permasalahan pembangunan, dan penelaahan dokumen perencanaan lain sebagai dasar perumusan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran RPJPD dan RPJMD yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).Selama proses input RKPD, staf Bapelitbang dan OPD sering mengalami kendala teknis, seperti error saat menyimpan atau menambahkan indikator kegiatan, yang menyebabkan pekerjaan harus diulang. Perubahan antarmuka SIPD tanpa pemberitahuan resmi juga menyulitkan pengguna dalam menyesuaikan diri. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dari OPD berdampak pada penjadwalan Musrenbang, penginputan data ke SIPD.

**b. Penganggaran**

Tahapan penganggaran dilaksanakan setelah RKPD ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Kepala daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rancangan KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD, yang kemudian diajukan dan dibahas bersama DPRD hingga disepakati. Setelah KUA-PPAS disepakati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA-SKPD) berbasis kinerja yang memuat indikator, sasaran, dan kebutuhan anggaran.

Aplikasi SIPD sering mengalami respon yang lambat dan loading yang lama, serta terdapat menu penting seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tidak dapat diakses. Selain itu, beberapa rincian belanja tidak tampil dengan lengkap dalam aplikasi, sehingga menghambat proses input dan validasi data. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan sistem, meski tantangan teknis seperti error aplikasi masih sering terjadi.

**c. Pelaksanaan**

Pada tahap ini, anggaran yang telah disahkan kemudian dilaksanakan. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan anggaran yaitu, keterlambatan pengajuan permintaan pembayaran oleh SKPD menunjukkan masih lemahnya koordinasi dalam pengelolaan keuangan di tingkat pelaksana. Hal ini berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran serta menghambat kelancaran kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, kendala teknis berupa lambatnya respon sistem SIPD menjadi hambatan tambahan yang memperlambat proses verifikasi dan eksekusi pembayaran.

**d. Penatausahaan**

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen keuangan seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebelum pelaksanaan APBD berjalan. Proses penatausahaan meliputi verifikasi dan pengesahan dokumen keuangan, pencatatan transaksi dalam buku kas umum, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

salah satu hambatan utama dalam SIPD adalah keterbatasan akses dalam memperbaiki kesalahan input data. Ketika terjadi kesalahan entri, seperti kelebihan penginputan anggaran atau data yang tidak sesuai, bagian perbendaharaan tidak dapat langsung melakukan koreksi secara mandiri melalui sistem. Perbaikan hanya dapat dilakukan melalui permohonan resmi dengan bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak fleksibel.

**e. Pelaporan**

Setelah pelaksanaan dan penatausahaan, SKPD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan seperti, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LP-SAL) Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan (Calk). SIPD hanya mampu menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sementara laporan keuangan lainnya berbasis akrual masih dikerjakan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa modul AKLAP dalam SIPD masih terbatas dan belum mampu mendukung proses pelaporan secara penuh. Ketidaklengkapan fitur sistem berdampak pada akurasi data dan efisiensi kerja pelaporan.

**f. Pertanggungjawaban**

Tahap selanjutnya adalah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Pertanggungjawaban ini harus transparan dan akuntabel, serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan keuangan daerah berikutnya.

**g. Pengawasan Keuangan Daerah**

Audit oleh BPK dilakukan dengan menggunakan dua sumber data dari SIPD dan kertas kerja manual. BKAD melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu antara keduanya untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD masih belum menjadi satu-satunya sumber data audit, karena keterbatasan sistem yang belum sepenuhnya stabil dan lengkap.

**Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan sistem terpadu yang wajib digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Secara regulasi, penerapan SIPD oleh BKAD Kabupaten Rote Ndao sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Namun, efektivitas sistem masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam integrasi data dan pelaporan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap (2022) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD di daerah belum sepenuhnya efektif, dan juga sejalan dengan Ekaputra yang mengungkapkan adanya kendala dalam penyusunan RKPD.

Sementara itu, penelitian Afrilia Karundeng menunjukkan integrasi SIPD dalam perencanaan dan penganggaran sudah cukup baik. Dalam praktiknya, proses perencanaan hingga pelaporan di Kabupaten Rote Ndao telah mengikuti alur SIPD, namun masih harus

didampingi dengan pencatatan manual karena belum optimalnya sistem. Khususnya dalam modul akuntansi dan pelaporan, SIPD belum mampu menghasilkan seluruh dokumen secara mandiri, yang berimplikasi pada efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Penggunaan SIPD mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti gangguan sistem, akses lambat, keterlambatan input data oleh OPD, serta keterbatasan fitur akuntansi dan pelaporan yang mengharuskan pencatatan manual. Upaya penyelesaian dilakukan dengan menghubungi help desk Pusdatin melalui surat resmi untuk mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menu akuntansi dan pelaporan di SIPD dikembangkan lebih lengkap sesuai kebutuhan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan akurat tanpa perlu pencatatan manual. Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan perbandingan antar daerah dan periode waktu yang lebih panjang guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas penerapan SIPD.

## DAFTAR REFERENSI

Astrawan, D. (2016). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal, 3(1), 1-10.

Charter, E. W. F., & J. (2016). Sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi, 13, 149-156.

Edu, D. S. (2024). Pengertian, manfaat, fungsi, dan prosedur penggunaannya SIPD. Detik.com. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7570575/apa-itu-sipd-ini-pengertian-manfaat-fungsi-dan-prosedur-penggunaannya

https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577

Indrianto, N., & Supomo, B. (2018). Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).

Inzany, R., et al. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 123-135.

Ma'aruf, D. E. S., & M. F. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Surabaya. Jurnal, 6(5), 365-380.

Mardiasmo. (2022b). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Nasution, M. I., & N. (2021). Penerapan SIPD Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 109. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577

Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review. Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya, 3(1), 44-68. https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.109

Nursobah, A. (2022). Manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam. Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.176

Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2).

Pesak, E., et al. (2021). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD): Penerapan dan implikasinya. Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, 10, 45-60.

Primastuti, A. (2020). Evaluasi proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1, 40.

Putri, R. K. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi Musrenbang tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal, 1(1), 1-10.

Rhandu Inzany, D. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan. Jurnal, 1(2), 1-10. https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.180

Simanjuntak, B. S. (2020). Pengelolaan keuangan daerah. Bab II, 8-16.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syairozi, M. I. (2021). Analisis penerapan good governance dalam sistem informasi keuangan daerah. Jurnal Ekonomi, 10(1), 2.

Syarif, A. (2023). Analisis penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630

Vitriana, N. (2022). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. Management, 9(1), 20-22. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947